

**PERKAWINAN CAMPURAN, PROSEDUR DAN
PENCATATANNYA DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/K/Pdt/2006)**

TESIS

**MYRNA ZACHRAINA
NPM: 0606008222**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**PERKAWINAN CAMPURAN, PROSEDUR DAN
PENCATATANNYA DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/K/Pdt/2006)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

**MYRNA ZACHRAINA
NPM: 0606008222**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : **Myrna Zachraina**

NPM : **0606008222**

Tanda Tangan :

Tanggal :

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Myrna Zachraina
NPM : 0606008222
Progam Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERKAWINAN CAMPURAN, PROSEDUR DAN PENCATATANNYA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/K/Pdt/2006)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Cibubur
Pada tanggal : 23 Juli 2008

Yang menyatakan,

(Myrna Zachraina)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, karena berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Perkawinan Campuran, Prosedur Dan Pencatatannya Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/K/Pdt/2006)”, guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah dengan tulus membantu penulis sehingga selesainya penulisan tesis ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hikmahanto Juwono, SH, LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Bapak Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH, selaku Dosen Penguji;
3. Ibu Farida Prihatini, SH, MH, CN, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Ibu Surini Ahlan Syarif, SH, MH, selaku Pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberi petunjuk dan saran-saran yang berarti dalam penyusunan tesis ini;
5. Ibu Theodora Yuni Shah Putri, SH, MH, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sekaligus sebagai Dosen Penguji;
6. Segenap staf Sekretariat Magister Kenotariatan FH-UI: Bpk. H. Irfangi, Bpk. Suparman, Bpk. Zaenal Arifin, Bpk. Adi Prabowo dan serta staf lain

yang tidak penulis sebutkan dalam tesis ini;

7. Orangtua tercinta: Bpk. H.M. Tamin dan ibu Hj. Hoesna, kakak-kakak, adik-adik, dan keponakan-keponakan tersayang yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta pengertian selama penulis menyelesaikan kuliah dan penulisan tesis ini;
8. Ibu Myrna Damayanti Djamhari Sirat sahabat penulis sejak kuliah bersama-sama di Fakultas Hukum Ekstensi Angkatan 2000 dan keluarga besar Bpk. Dr. Ir. Djamhari Sirat;
9. Rekan-rekan mahasiswa notariat Angkatan 2006 ; dan
10. Atasan dan rekan-rekan penulis di kantor.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajian. Oleh karena itu segala kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga thesis ini dapat memberikan manfaat.

Depok, Juli 2008

Myrna Zachraina

0606008222

ABSTRAK

Nama : Myrna Zachraina
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Perkawinan Campuran, Prosedur Dan Pencatatanya Di Indonesia

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/K/Pdt/2006)

Dalam kehidupan sehari-hari penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), masih sering diabaikan karena pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai suatu tindakan administratif belaka, sehingga banyak pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan mereka, baik perkawinan biasa maupun perkawinan campuran yang dilakukan di dalam negeri maupun yang dilakukan di luar negeri. Apakah akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan terhadap status istri dan anak? Bagaimanakah konsekuensi atas perkawinan tersebut apabila salah satu pihak akan mengajukan perceraian? Metode penelitian penulisan tesis ini bersifat yuridis normatif, dengan mempelajari, membaca, menelusuri kepustakaan tentang pencatatan perkawinan, keputusan pengadilan dan sumber relevan lainnya untuk mendapatkan landasan teori dan implementasinya. Akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan terutama pada status istri dan anak yaitu: bahwa perkawinan tersebut dianggap belum sah dimata negara; apabila lahir anak-anak dalam perkawinan tersebut, mereka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan) baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Konsekuensi atas perkawinan tersebut apabila salah satu pihak akan mengajukan gugat perceraian adalah harus mencatatkan terlebih dahulu perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut dengan tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia di lembaga pencatatan perkawinan di wilayah dimana ia melaksanakan perkawinannya saat itu, atau di wilayah Indonesia dimana ia berdomisili. Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu agar ayat (1) dan (2) dijadikan satu pasal, sehingga tidak ada dua perbuatan hukum yang terpisah; diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas di Indonesia tentang adanya Undang-undang lain selain UU Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar ada keseragaman dalam prosedur pencatatan perkawinan.

Kata Kunci:

Perkawinan, Perkawinan Campuran, Pencatatan Perkawinan Campuran

ABSTRACT

Name : Myrna Zachraina
Program of Study : Notary
Title : Mixed Marriage, Procedure And Its Registration In Indonesia
(Case Study of the Supreme Court Judgment
No.1428/K/Pdt/2006)

In everyday activities, the implementation of Article 2 paragraph (2) of Law No.1 Year 1974 regarding Marriage (Marriage Law), is quite often being ignored because the registration of marriage is merely considered as an administrative process, therefore there are many couples who do not register their marriage, both normal marriage and mixed marriage which was performed in Indonesia as well as abroad. What would be the legal aspect of a mixed marriage which is not registered toward the status of the wife and the children? What consequences on such marriage if one of the spouses would file a divorce? The writing method of this thesis is normative jurisdiction by reviewing, reading and observing literatures of marriage registration, court rulings and other relevant reading materials to obtain the theoretical background and its implementation. The legal consequence of the mixed marriage which was not registered in the registration institution especially to the status of the wife and children is that such marriage is not considered valid by the state; the children from such marriage are only considered as only having a relationship with the mother and the mother's family (Articles 42 and 43 Marriage Law), and the wife and children borne do not have the right to ask for financial support or being the heirs of the father. The consequences of such marriage should one of the spouses want to file a divorce is to first register their marriage performed abroad in the country where the marriage is performed shall be bound to Indonesian positive law in the registration institution where she/he he/her domiciles. A revision to Article 2 of the Marriage Law must be carried out in which paragraph (1) and paragraph (2) should be merged into one article, therefore there will be no two separate legal actions; a socialization should be held for the general public regarding other law, apart from the Marriage Law, that stipulates marriage registration, which is Law No. 23 Year 2006 regarding Population Administration so there will be a uniformity on the procedure of marriage registration.

Keywords:

Marriage, Mixed Marriage, Registration of Mixed Marriage

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
BAB I – PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II - PERKAWINAN CAMPURAN, PROSEDUR DAN PENCATATANNYA DI INDONESIA	
A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan	12
3. Perkawinan Campuran	20
B. PENGERTIAN DAN KONSEPSI PENCATATAN PERKAWINAN	
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	21

2.	Konsepsi Pencatatan Perkawinan	23
3.	Akibat Hukum Tidak dicatatnya perkawinan	24
C. LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA		
1.	Kantor Urusan Agama (KUA)	25
a.	Sejarah KUA	25
b.	Fungsi KUA	25
2.	Lembaga Catatan Sipil	26
a.	Sejarah Lembaga Catatan Sipil di Indonesia	26
b.	Fungsi Kantor Catatan Sipil	29
D. PROSEDUR PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PERKAWINAN CAMPURAN		
1.	Prosedur Perkawinan Campuran yang dilakukan di Indonesia	30
a.	Surat-surat yang harus disiapkan	31
b.	Pencatatan Perkawinan	33
c.	Legalisir Kutipan Akta Perkawinan	33
2.	Prosedur Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia	34
BAB III – ANALISA PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN CAMPURAN STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1428/K/Pdt/2006)		
A. PEMBAHASAN KASUS		
I.	Tingkat Pengadilan Negeri Denpasar	35
II.	Tingkat Pengadilan Tinggi	40
III.	Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	40
IV.	Putusan Mahkamah Agung	51
B. ANALISA KASUS		
		53

BAB IV – KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	63
----------------	----

LAMPIRAN

